

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anand, G., 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Prenadama Group.
- Andreas, D., 2021. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bachtiar., 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpan Press.
- Fuady, M., dkk. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hutanghalung., S. 2018. *Kontrak Bisnis Di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajati, S., Poespasari, E, D., & Moechthar, O. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.
- Khairandy, R., 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komkandoko, G, dkk., 2013. *Panduan dan Contoh Menyusun Surat Penjanjian dan Kontrak Terbaik*. Jakarta: Buku Seru.
- Moechthar, O., 2017. *Dasar-Dasar Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga UnPress.
- Muhamad, T., 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV Spcial Politic Genius.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univesity Press.
- Muhammad Syahrums, S, T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nugroho, B. D., 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Petama ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahim., 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Pratik*. Makasar: Humanities Genius.
- Rahman, A., 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salim, 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Salim, H, S., 2017. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakrata: Sinar Grafik.
- Simanjutak, P., 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soenandar, T., 2016. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Subekti., 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

- Suharnoto., 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Susanti, A, N., 2018. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Syahrum, M., 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Riau: CV Dotplus Publisher.
- Titik, T., 2018. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Windari., dkk. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahman., 2021. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: Jakad Media Publishin.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Abon, M, A., Dantes, K.F., & Adanyani, N.K.S. 2022. Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*. P. 64-80.
- Adati, M, A., 2018. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*. p. 6.
- Dalimunthe, D., 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*. P. 12-29.
- Dinanyanti, A, R., 2013. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(3), p.2.
- Handriani, A., Mulyanto, E., 2021. Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*. P. 1-10.
- Jati, I, W., 2023. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. III(I), p. 21.
- Mahesa, K.H., Setianto, M, J., & Dantes, K.F., 2023. Perlindungan Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4). P. 115-124.
- Noor, M., 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 14. P. 1.
- Pangaribun, T., 2019. Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Rugi Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vo 49.p.2.
- Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiarmaka, K., 2020. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Ganesa Law Review*. p. 132-143.
- Pradnyaswari, A, A., 2013. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam

- Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car). *Jurnal Advokasi*, 3(2).p. 29.
- Prasetyo, H., 2017. Pembaharuan hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan hukum*, 4(1).p. 66.
- Rasuh, D. J., 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Padsal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, p. 2.
- Rediastika, G., Dantes, K. F., & Suastika, I. N., 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 Tentang Jaminan Fidusia Bagia Debitur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan Akta Di Bawah Tngan Oleh Pihak Ketiga Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), p. 500-514.
- Rondonuwu, R., 2018. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPperdata. *Lex Crimen ejournal unsrat*, p. 5-12.
- Sasauw, C., 2015. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, II(1),p. 100.
- Setianto, M, J, dkk., 2023. Mekanisme Pelaksanaan Sengketa Pengadaan Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Vol. 3.
- Sinaga, N. A., 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjain Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), p. 107-120.
- Tjukup, I. K., 2016. Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, p.181.
- Wardani, N, K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. 2022. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), p. 60-67.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Sg

